

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Abintoro Prakoso, 2006, *Penemuan Hukum Sistem Metode, Aliran Dan Prosedur Menemukan Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Agus Waryoko, 2022, *Pailit Sebagai Upaya Ultimum Remedium Penyelesaian Hutang Debitur*, Tegal: Universitas Pancasakti.
- Ali Hadi Sahab, 2021, *Akibat Hukum Notaris dinyatakan Pailit*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Aprili Valentina, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Menurut Ketentuan Perundang Undangan di Indonesia*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Jambi.
- Arya Suyudi, dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit, Cet. 2*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Bernard Nainggolan, 2014, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung: Alumni.
- Charlie Rudyat, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardika.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan Pengurus dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Emmy Yuhassarie, 2005, *Undang-undagn Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Flikna Lailul Muna, 2012, *Pemberhentian Jabatan Notaris Karena Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- G.H.S Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- , 2000, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- , 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- , 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- , 2014, *“Hukum Notaris Indonesia”*, Bandung: Refika Aditama.
- Harlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartini Rahayu, 2017, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Malang: Penerbit Setara Press.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung:m Citra Aditya Bakti.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya.
- Hadi Shubhan, 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia.

- H. Sobandi, 2021, *Litimasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- I Nyoman Ganang Bayu Weda, 2022, *Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Notaris di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Magister Kenotariatan
- Ivda Dewi Amrih Suci and Herowati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Junita Sari Ujung, 2008, *Independensi Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Tesis, Depok: Universitas Indonesia.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, ed.1, cet. 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kholidah, dkk, 2023, *Notaris dan PPAT di Indonesia*, Jakarta: Semesta Aksara.
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan*, Bandung: Mandar Maju.
- Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mosgan Situmorang, 2021, *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*, Jakarta: Balitbangkumham Press.
- Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*, Yogyakarta: CV. Cakrawala Media.

- Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M.Hadi Shubhan, 2023, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana Pranada Media Group.
- Rahayu, Indah, et al. 2024, "Pendidikan Lingkungan Hidup dengan Membentuk Kesadaran Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Kalangan Pelajar." *Global Education Journal 2.2* (2024).
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ronaldo, 2022, *Hukum Bisnis*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Selly Masdalia Pratiwi, 2014, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Simon, 2011, *Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjung Pinang*, Tesis, Universitas Dipenogoro Semarang.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Surabaya: Mandar Maju.

- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Rejeki Hartono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat, Burgelijk Wetboek*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Kencana.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Utrecht, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.
- Victor Situmorang dan Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wawan Tunggal, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta: Milenia Populer.
- Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*, Bogor: Roda Publika Kreasi.
- Zahara, Ayu, et al. 2024, "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemegang Protokol Atas Ketidaklengkapan Minuta Akta Yang Diterimanya." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1.8 (2024).
- Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. JURNAL

- Aga Waskitha Wiryawan, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance* No. 1 Vol. 5 Januari 2020: 193-206.

- Agnes Lorentina Br SembirinG, et.al, 2025, Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor: 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Sby), *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol: 2 No: 2, Februari 2025.
- Amira Inaz Clarissa Pambudi, et.al, 2022, Prinsip Kepastian Hukum Pemberhentian Notaris Akibat Dinyatakan Pailit, *Jurnal Mimbar Yustitia* Vol. 6 No 1 Juni 2022.
- Annisa Salsabilla Ivanka dan Marwanto, 2023, Problematika Norma Hukum Kepailitan Mengenai Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdampak Pada Pemberhentian Jabatan Notaris, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 03 Desember 2023.
- Antonius Karia.nga. (2017)., Analis.is Hak Konsumen terha.dap Perusa.haa.n yang dinyatakan Pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga. *Lex Administratum*,5(7),109-115. <https://ejournal.unsr.at.ac.id/index.php/administratum/article/view/17546>.
- A. Riris Muldani, 2016, Pertimbangan Hakim Yang Tidak Menerima Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Multinasional Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 30/Pailit/2002/Pn. Niaga/Jkt/Pst). *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*
- Boedi Harsono, PPAT, 2023, Sejarah Tugas dan Kewenangannya, *Jurnal dan Majalah Renvoi*, Nomor 8.44. jv.
- Elita Rahmi, Yetniwati dan Iskandar Zulkarnain, 2022, Mekanisma Pengangkatan Notaris dan Evaluasi Mutululusan Berdasarkan Tracer Study Magister Kenotariatan Unja, *Jurnal Ilmu Sosial* Vol.1.
- Galuh P, 2021, Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris. *Diversi Jurnal Hukum* ,4(2), 199-217. DOI: <https://doi.org/1.0.32503/diversi.v7i.2>.
- Gedalya Iryawan, et.al, 2018, Syarat Kepailitaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* 3 (1) P.1-12. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertha.semaya/article/view/40730>.
- lham Rizki Hutabarat, Marsella, dan Sri Hidayani, 2022, Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Medan), *ARBITER: Jurnal*

Ilmiah Magister Hukum, Vol.4 No.1, hlm. 80.

- Juniresta, Adheria, Budi Santoso, and Hanif Nur Widhiyanti. "Impilikasi yuridis putusan pailit terhadap profesi notaris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12.1 (2021).
- Nabila Aulia Putri, 2025, Kepastian Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang dinyatakan Pailit, *Ranah Research: Journal of Multidiciplinary Research and Development, Vol. 7, No. 2, Januari 2025.*
- Nandayani, N, K, W., et al, 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemberhentian Notaris Dalam Konteks Kepailitan, *Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 5, Issue 2, 2024, Page 977-985.*
- Pratiwi A, 2020, Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium Jurnal Ilmi.ah Hukum Kenotariatan*,9(2),95-104. DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i2.273>.
- Putra dan Priyanto, 2020, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dengan Bahasa Asing. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*,5(3), hlm. 529. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p08>.
- Reza Muhammad, 2014, Analisis Terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 01/pailit/20), *Premise Law Journal. 12, 13953*
- Rosmidah, M. Hosen dan Sasmiar, Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi, *Jurnal Recital Review Vol. 5 No. 2 Tahun 2023. E-ISSN: 2623-2928.*
- Rizal Syah Nyaman dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, 2023, Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)Volume. 05, Nomor 02, (2023), Fakultas Hukum Unmas Denpasar* ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555.
- Rizal, Muhammad Yose. "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum* 13.1 (2019).
- Rizki Nurmayanti dan Akhmad Khisni, 2017, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta Vol. 4 No. 4*

Desember 2017.

Safitri, et.al, 2024, "Tanggung Jawab Hukum Kepala Desa Atas Pemalsuan Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah." *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 9 (2024).

Shahab, A. H, 2021, Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3).

Wiryawan, A. W, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1).

Yetniwati, Elita Rahmi, Hartati, 2019, Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, Pengabdian Masyarakat, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Volume 3 Nomor 2.

C. RUJUKAN INTERNET

<https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada tanggal 20 Mei 2025

<https://bursadvocates.com/prosedur-pengajuan-kepalitan/> diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05>.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.